

BAB15: PENUTUP

Salah satu “guru” manajemen dunia, Edwards Deming, dalam sebuah karyanya *Out of Crisis* (1986), mengatakan “*whoever rules the standards rules the industry*”. Siapapun yang menguasai standar akan menguasai industri. Dan, sejalan dengan pemikiran Porter, industri merupakan pilar utama dari daya saing nasional. Sangat terang benderang di sini bahwa standar sangat berperan penting untuk menumbuhkan daya saing nasional.

Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI) memiliki nuansa dan artikulasi kental untuk menumbuhkan daya saing Indonesia di era perdagangan bebas, khususnya dalam konteks CAFTA. GENAP SNI, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BSN, difokuskan untuk membangun daya saing sebelas sektor industri melalui penerapan SNI.

Sebenarnya, upaya meningkatkan daya saing industri melalui penerapan SNI sudah lama digagas dan dilaksanakan. Salah satu bentuknya adalah *SNI Award*, ajang penganugerahan dan

penghargaan bagi kalangan industri penerap SNI yang sudah 5 tahun ini diselenggarakan. Melalui ajang ini, komitmen untuk membangun masyarakat yang sadar akan standar terus ditegaskan.

Tanpa adanya upaya dan komitmen terhadap penerapan standar untuk meningkatkan daya saingnya, maka Indonesia terancam oleh risiko menjadi bangsa yang termarginalkan di era kompetisi global. Menurut Hatta Raharja, Menteri Koordinator Perekonomian RI, lemahnya daya saing suatu bangsa akan mengakibatkan rentannya kemandirian bangsa tersebut karena akan terjebak pada dua perangkap globalisasi atau *globalisation trap* yaitu perangkap teknologi atau *technology trap* dan perangkap budaya atau *culture trap*.

Kedua perangkap ini umumnya dengan cepat dapat dialami oleh suatu bangsa dengan karakter yang lemah. Sebagai misal perangkap teknologi akan menjebak sebuah bangsa untuk membangun industri yang hanya berbasiskan pada lisensi atau re-alokasi pabrik tanpa adanya

pembinaan kapabilitas teknologi, sehingga bangsa tersebut, meskipun tampaknya dapat memfabrikasi berbagai produk, namun esensinya proses fabrikasi itu sebenarnya hanya dilakukan pada tahapan yang relatif tidak atau kurang penting. Adapun tahapan dari proses yang lebih penting (atau sangat penting) dari proses fabrikasi tersebut masih dikuasai oleh negara asing. Sehingga pada akhirnya bangsa yang demikian aktifitas industrinya akan sangat bergantung dengan entitas asing.

Pada dasarnya, Gerakan Nasional Penerapan SNI adalah pembangunan kapasitas bangsa (*nation capacity building*). Yakni, standar dapat menjadi bagian memperkuat nasionalisme karena standar merupakan cara bagaimana menghadapi proses-proses penting dalam globalisasi yaitu transfer teknologi, hubungan antar pelaku ekonomi, akses pasar terhadap produk (barang & jasa), optimisasi infrastruktur, peningkatan mutu, keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan, diseminasi sistem manajemen dan proses bisnis yang baik.

Dalam mencapai sasaran sebesar mungkin manfaat dalam standar, maka Badan Standardisasi Nasional diberi misi yang sangat jelas yaitu membuat Standar Nasional Indonesia (SNI), satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI disusun sebagai standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional, memperbaiki transparansi dan efisiensi, serta melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat lingkungan dan keamanan.

Dengan demikian, SNI menjadi salah satu bagian *instrument* vital untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul ketika berlangsungnya globalisasi di Indonesia. Selain akan melindungi masyarakat, meningkatkan daya saing, keamanan, kesehatan dan lingkungan, maka SNI menjadi faktor untuk menghadapi proses globalisasi yang bergerak melalui proses kerjasama regional seperti CAFTA, atau sebentar lagi India AFTA, Kanada AFTA dan lain-lain. Pada intinya, SNI harus

menjadi bahasa penting dalam transaksi-transaksi di bidang perdagangan, dan transfer teknologi di bidang industri dan teknologi. SNI adalah bahasa nasionalisme di bidang perdagangan, industri dan teknologi untuk menghadapi globalisasi. ■